

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upah Minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan upah minimum belum menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten. Kondisi tersebut disebabkan karena struktur pasar tenaga kerja masih didominasi sektor informal serta perusahaan cenderung melakukan penyesuaian melalui efisiensi produksi, pengurangan jam kerja, dan penggunaan teknologi sehingga perubahan upah minimum tidak secara langsung memengaruhi penyerapan tenaga kerja.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga tenaga kerja menjadi lebih produktif, kompetitif, dan mudah terserap dalam pasar kerja. Dengan demikian, peningkatan IPM dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten.
3. Pertumbuhan Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk, khususnya usia produktif, mampu

mendukung aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten. Sebagai wilayah industri dan penyangga ibu kota, perkembangan sektor industri, perdagangan, dan jasa di Provinsi Banten masih mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja sehingga pertumbuhan penduduk selama periode penelitian lebih cenderung memberikan dampak positif terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berfokus pada kebijakan Upah Minimum, tetapi juga perlu meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta memperluas kesempatan kerja. Hal ini penting agar kebijakan upah dapat berjalan seimbang dengan kemampuan dunia usaha dalam menyerap tenaga kerja.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan kerja perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri. Program link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja perlu diperkuat guna mengurangi ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja.
3. Pemerintah perlu mendorong investasi, khususnya pada sektor-sektor padat karya, dengan tujuan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi dampak negatif dari pertumbuhan penduduk terhadap peningkatan pengangguran.
4. Pengelolaan pertumbuhan penduduk perlu dilakukan secara lebih terarah melalui kebijakan kependudukan yang efektif, seperti program keluarga

berencana serta peningkatan kualitas angkatan kerja, sehingga jumlah tenaga kerja dapat lebih seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja.

5. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, tingkat pendidikan, dan struktur industri agar dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka.